

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.716, 2010

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Pelimpahan. Urusan Pemerintahan.

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- efisiensi Menimbang: a. bahwa dalam rangka efektivitas dan urusan pemerintahan penyelenggaraan menjadi yang kewenangan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011, sebagian urusan pemerintahan perlu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah melalui Dekonsentrasi, dan ditugaskan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Tugas Pembantuan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4407);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Eselon I Pembina adalah Unit Organisasi/komponen Pembina kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.
- 2. Eselon II Pembina adalah Unit Kerja yaitu Biro/Pusat/Direktorat pada unit Eselon I Pembina yang bertanggungjawab atas teknis pembinaan kegiatan

- Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.
- 3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertical di wilayah tertentu.
- 4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain, untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
- 5. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertical pusat di daerah.
- 6. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di bidang tertentu di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undangundang.
- 9. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
- 10. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun.
- 11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis

- Kementerian Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
- 13. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
- 14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN DAN DITUGASKAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011, dapat dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah melalui dekonsentrasi.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011, dapat ditugaskan kepada gubernur/bupati/walikota melalui tugas pembantuan.
- (3) Penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi.

- (2) Lingkup urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, dan anggaran tugas pembantuan.
- (3) Lingkup urusan pemerintahan yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai RKP, Renja-KL, dan RKA-KL.

- (1) Dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mensinergikan hubungan pusat dan daerah.
- (2) Dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
 - b. meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah dalam mendukung reformasi birokrasi dan pemantapan demokrasi;
 - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat perdesaan;
 - d. meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah dan kawasan; dan
 - e. meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintahan.

- (1) Program dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendagri;
 - b. Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
 - c. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - d. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
 - e. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemendagri; dan
 - f. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
- (2) Rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

- (1) Program tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. Program Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah;
 - b. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
 - d. Program Bina Pembangunan Daerah.
- (2) Rencana program, kegiatan dan anggaran tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk masing-masing provinsi tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini

Pasal 7

- (1) Rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam RKA-KL dan DIPA.
- (2) Tata cara penyusunan RKA-KL dan DIPA serta penetapan/pengesahannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

KOORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 8

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan unit eselon I Pembina, gubernur, dan bupati/walikota.
- (2) Unit eselon I Pembina mengkoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan unit eselon II dan para SKPD pelaksana dekonsentrasi dan tugas Pembantuan di daerah.
- (3) Unit eselon II Pembina mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan para pejabat pengelola kegiatan di daerah.

Pasal 9

(1) Dalam menyelenggarakan rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), gubernur dan bupati/walikota wajib:

- a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. menetapkan SKPD dan menyiapkan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan; dan
- c. melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota memberitahukan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2011 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Gubernur dan bupati/walikota mengkoordinasikan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran dan pertanggung jawaban keuangan dan barang dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah.
- (2) Gubernur menugaskan SKPD Provinsi yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup aspek perencanaan, penatausahaan anggaran, pencapaian realisasi anggaran, pengendalian dan pelaporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV

PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan dekonsentrasi dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan penetapan dari gubernur.
- (2) Kegiatan tugas pembantuan dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan penetapan dari gubernur atau bupati/walikota.
- (3) Penetapan SKPD pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagiam Kesatu

Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi

Pasal 12

Dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dibentuk pejabat perbendaharaan yang meliputi:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar; dan
- d. Bendahara Pengeluaran.

Pasal 13

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a selaku Pejabat perbendaharaan kegiatan dekonsentrasi ditunjuk dan ditetapkan oleh gubernur dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pejabat yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD atau Pejabat lain dengan eselonering satu tingkat dibawah Kepala SKPD dalam lingkup SKPD.

Pasal 14

Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah Pejabat dengan eselonering satu tingkat dibawah Kuasa Pengguna Anggaran dalam lingkup SKPD.

Pasal 16

Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan huruf d adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup SKPD yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan

Pasal 17

Dalam pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dibentuk pejabat perbendaharaan yang meliputi:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar; dan
- d. Bendahara Pengeluaran.

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan dari gubernur/bupati/walikota yang menerima penugasan.
- (2) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Unit Eselon I Pembina atas nama Menteri dengan Surat Keputusan Menteri.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala SKPD atau Pejabat lain dengan eselonering satu tingkat dibawah Kepala SKPD dalam lingkup SKPD.

Pasal 19

Menteri mendelegasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji/Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 20

Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah Pejabat dengan eselonering satu tingkat dibawah Kuasa Pengguna Anggaran dalam lingkup SKPD.

Pasal 21

Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dan huruf d adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup SKPD yang memenuhi persyaratan.

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) dapat menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan pembantu bendahara di luar Lingkup SKPD.
- (2) Penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara sebagaimana pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. Besaran kegiatan dan anggaran yang dikelola;
- b. Sumber pendanaan; dan
- c. Lokasi kegiatan.
- (3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat dengan eselonering satu tingkat dibawah Pejabat Pembuat Komitmen.
- (4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

- (1) Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1), memuat tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. menyusun dan menandatangani DIPA berdasarkan RKA-K/L yang disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Unit Eselon I Pembina; dan
 - b. menyusun dan menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.
- (2) Penyusunan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Eselon I Pembina, Sekretariat Jenderal dan SKPD Provinsi yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Penyampaian DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat satu bulan setelah diterimanya pengesahan DIPA dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan RKA-KL yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Bagian Ketiga

Revisi DIPA dan Mekanisme Penyaluran Dana

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan DIPA dekonsentrasi dan DIPA tugas pembantuan, dapat dilakukan revisi anggaran.
- (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian anggaran meliputi penambahan atau pengurangan rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran berubah.
- (3) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berupa perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap.
- (4) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk DIPA dekonsentrasi dan DIPA tugas pembantuan.
- (2) Penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Kas Umum Negara.
- (3) Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) Kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib menyusun laporan manajerial.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;

- c. kendala yang dihadapi; dan
- d. saran tindak lanjut.
- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib menyusun laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan dan laporan barang.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. neraca;
 - b. realisasi anggaran; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan
- (4) Penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara bersama-sama atau terpisah dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BARANG HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 31

- (1) Barang yang dibeli dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan barang milik negara.
- (2) Kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dihibahkan kepada pemerintah daerah.
- (2) Tata cara hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRANI: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR: 66 Tahun 2010 TANGGAL: 31 Desember 2010

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK MASING-MASING PROVINSI

0		DAEF	RAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
			2	3	4
	PR	OVINSI	ACEH	Rp 68.153.216.000	
	a.		NGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN S TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM RI	-	SETJEN
		1) F	erencanaan Program dan Anggaran	-	
		а	 Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri 	Rp 175.000.000	
	b.	UMUN			DITJEN PUM
		K	enyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta erjasama Daerah		
		а	 Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 	Rp 222.000.000	
		b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	Rp 300.000.000	
			engembangan dan Penataan Wilayah Administrasi an Perbatasan		
		а) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 479.932.000	
		•	asilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Jencana		
		a) Pengurangan Resiko Bencana di Aceh-DRRA	Rp 4.168.200.000	
	C.		TAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
			bukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
ŀ		а) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 183.107.000	
	d.	DAER			DITJEN OTDA
		Ĺ	Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan	B 00 000 000	
		а	,	Rp 20.200.000.000	
	е.	PEME	ERDAYAAN MASYARAKAT DAN RINTAHAN DESA		DITJEN PMD
			asilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		

NO		DA	RAH/PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2		3	4
			a) Fasilitasi Penguatan Kele Penanggulangan HIV/AID		Rp 100.000.000	
		2)	Peningkatan Kapasitas Penye Pemerintahan Desa dan Kelur			
			a) Peningkatan Kapasitas ba	agi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	Fasilitasi Pengelolaan SDA da	n TTG		
			a) PNPM - Lingkungan Mand	diri Perdesaan	Rp 75.000.000	
		4)	Pengembangan Usaha Ekono	mi Masyarakat		
			a) Lembaga Keuangan Mikro Desa, TKPK dan PNPM -		Rp 530.000.000	
		5)	Peningkatan Kemandirian Mas	syarakat Perdesaan		
			a) PNPM - Mandiri Perdesaa	an	Rp 41.426.427.000	
		6)	Dukungan Manajemen Dan Pe Feknis Lainnya Ditjen PMD	elaksanaan Tugas		
			a) Fasilitasi Penguatan Kele	mbagaan PMD	Rp 93.550.000	
2.	PRO	NIVC	SUMATERA UTARA	Rp 30.329.479.000		
	a.		JNGAN MANAJEMEN DAN F AS TEKNIS LAINNYA KEMEN ERI		SETJEN	
		1)	Perencanaan Program dan An	ggaran		
			a) Pembinaan/Fasilitasi Koo dan Pengendalian DKTP Kemendagri		Rp 200.000.000	
		2)	Pengelolaan Data, Informasi,K Felekomunikasi		D. 470.045.000	
			 Fasilitasi Pembinaan Pem Penyelenggaraan E-Gove 		Rp 176.215.000	
	b.	UMU				DITJEN PUM
		1)	Penyelenggaraan Hubungan F Kerjasama Daerah	'usat dan Daerah serta		
			 Peningkatan Peran Gube Pemerintah Pusat di Wila 		Rp 259.640.000	
		2)	Pengembangan dan Penataan dan Perbatasan		B	
			 Fasilitasi Penegasan Bata Pasti di Lapangan Antar I Kab/Kota 		Rp 300.000.000	
			p) Pembinaan dan Pembaku Rupabumi Wilayah Admir		Rp 620.247.000	
		3)	Fasilitasi Pencegahan dan Per Bencana	nanggulangan		

		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
		2	3	4
		a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 300.000.000	
•	C.	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
		a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 360.308.000	
	d.	PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
		Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD		
		a) Transformasi Pemerintahan Daerah di Kepulauan Nias-NITP	Rp 5.200.000.000	
		Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
		Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP		
	e.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
		a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
		a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
L		3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
		a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan	Rp 75.000.000	
L		4) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		 a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW 	Rp 1.177.130.000	
		5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
		a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 21.045.399.000	
		Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
		a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 97.940.000	
T	f.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
_		Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		

NO		DA	ERA	H/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1				2	3	4
3.	PRO	OVIN	SI S	UMATERA BARAT	Rp 11.701.943.000	
	a.	TUC		GAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM I		SETJEN
		1)	Per	rencanaan Program dan Anggaran		
			a)	Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 225.000.000	
	b.	UM	UM	ATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN		DITJEN PUM
		1)	Ker	nyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta rjasama Daerah		
			a)	Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 242.000.000	
		2)	dar	ngembangan dan Penataan Wilayah Administrasi n Perbatasan		
			a)	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota	Rp 300.000.000	
		3)		silitasi Pencegahan dan Penanggulangan ncana		
			a)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR	Rp 750.000.000	
	C.	PEN		AAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		1)		kungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas knis Lainnya Ditjen Dukcapil		
			a)	Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 179.655.000	
	d.	PE	MER	RDAYAAN MASYARAKAT DAN INTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1)		silitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya syarakat		
			a)	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
		2)		ningkatan Kapasitas Penyelenggaraan merintahan Desa dan Kelurahan		
			a)	Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	Fas	silitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
			a)	PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan	Rp 125.000.000	
		4)		ngembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	B 0=	
			a)	Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	

NO		DAER	AH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
		5) Po	eningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
		a)	PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 9.092.578.000	
			ukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas eknis Lainnya Ditjen PMD		
		a)	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 87.710.000	
	е.		DIKAN DAN PELATIHAN APARATUR NTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
			ukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas eknis Lainnya Badan Diklat		
		a)	Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 150.000.000	
4.	PR	OVINSI	RIAU	Rp 7.682.195.000	
	a.		NGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN S TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM RI		SETJEN
		1) Po	erencanaan Program dan Anggaran		
		a)	Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 200.000.000	
	b.	PENG! UMUM	UATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN		DITJEN PUM
			enyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta erjasama Daerah		
		a)	Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 247.000.000	
		b)	Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	Rp 300.000.000	
		•	engembangan dan Penataan Wilayah Administrasi an Perbatasan		
		a)	Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 343.736.000	
		b)	Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga	Rp 250.000.000	
		•	asilitasi Pencegahan dan Penanggulangan encana		
		a)	Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 300.000.000	
	C.		TAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
			ukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas eknis Lainnya Ditjen Dukcapil		

NO		DA	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
			 a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota 	Rp 252.394.000	
	d.		MBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1)	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
		2)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
			a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
			a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	
		4)	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
			a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 5.152.325.000	
		5)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 86.740.000	
5.	PR	OVIN	ISI KEPULAUAN RIAU	Rp 6.195.604.000	
	a)	TU	KUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN GAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM GERI		SETJEN
		1)	Perencanaan Program dan Anggaran		
			 a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri 	Rp 195.000.000	
	b)		NGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UM		DITJEN PUM
		1)	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
			Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 236.880.000	
			b) Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan	Rp 200.000.000	
		2)	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
			 Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga 	Rp 300.000.000	

NO		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1		2	3	4
	c)	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
		 a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota 	Rp 149.848.000	
	d)	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
		a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
		a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		 a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW 	Rp 250.000.000	
		4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
		a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 4.279.936.000	
		5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
		a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 86.140.000	
	е)	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
		Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
		a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 197.800.000	
6.	PR	OVINSI JAMBI	Rp 8.638.377.000	
	a)	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
		1) Perencanaan Program dan Anggaran		
		 a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri 	Rp 200.000.000	
	b)	PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
		 Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah 		

	DA	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONE PEMBINA
		2	3	4
		 Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 	Rp 226.490.000	
	2)	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
		 Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota 	Rp 200.000.000	
		b) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 251.968.000	
	3)	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan		
		 Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam 	Rp 400.000.000	
c)	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			DITJEN DUKCAPII
	1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
		 Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota 	Rp 140.172.000	
d)		MBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1)	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
		 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS 	Rp 100.000.000	
	2)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
		a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		 a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW 	Rp 1.066.140.000	
	4)	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
		a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 5.635.607.000	
	5)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
		a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 85.000.000	
е)		NDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		

NO		DAE	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
			a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 133.000.000	
7.	PR	OVINS	SI SUMATERA SELATAN	Rp 12.551.835.000	
	a)	_	UNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN AS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM ERI		SETJEN
		1)	Perencanaan Program dan Anggaran		
			a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 200.000.000	
			Pengelolaan Data, Informasi,Komunikasi dan Telekomunikasi		
			b) Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government	Rp 231.650.000	
	b)	UMU			DITJEN PUM
			Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
			 Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 	Rp 240.536.000	
	c) PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			DITJEN DUKCAPIL	
			Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
			a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 179.595.000	
	d) PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH			DITJEN OTDA	
		1)	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
			 a) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP 	Rp 2.758.221.000	
	е)	PEM	BERDAYAAN MASYARAKAT DAN IERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
			Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
			a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
			a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 810.000.000	

NO		DAERAH/	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA	
1		2		3	4	
			gkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan			
		a) F	PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 7.595.463.000		
			ngan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas s Lainnya Ditjen PMD			
		a) F	asilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 84.070.000		
	е)		AN DAN PELATIHAN APARATUR RIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT	
			ngan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas s Lainnya Badan Diklat			
		a) k	Coordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 152.300.000		
8.	PR	OVINSI BAN	IGKA BELITUNG	Rp 4.440.021.000		
	a)	TUGAS TE NEGERI	AN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN EKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM		SETJEN	
			canaan Program dan Anggaran			
		, d k	Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan lan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 195.000.000		
	b)	PENGUAT UMUM	AN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN		DITJEN PUM	
			elenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta sama Daerah			
			Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 217.464.000		
			Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan	Rp 200.000.000		
		2) Fasilit	asi Pencegahan dan Penanggulangan			
		a) F	Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 300.000.000		
	c)	PENATAA	N ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL	
			ngan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas s Lainnya Ditjen Dukcapil			
		F F K	Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 126.210.000		
	d)	PEMERIN	DAYAAN MASYARAKAT DAN TAHAN DESA		DITJEN PMD	
		Masya	asi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya arakat			
			asilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000		

NO		DAER	AH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
			eningkatan Kapasitas Penyelenggaraan emerintahan Desa dan Kelurahan		
		a)	Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3) Pe	engembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		a)	Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 514.890.000	
		4) Pe	eningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
		a)	PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 2.341.317.000	
			ukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas knis Lainnya Ditjen PMD		
		a)	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 84.040.000	
	е)		DIKAN DAN PELATIHAN APARATUR NTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
			ukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas eknis Lainnya Badan Diklat		
		a)	Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 161.100.000	
	-	0.41.101		D 0055 500 000	
9.			BENGKULU	Rp 8.855.508.000	
	a)		NGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN S TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM RI		SETJEN
		1) Pe	erencanaan Program dan Anggaran		
		a)	Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 240.000.000	
	b)	PENGU UMUM	JATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN		DITJEN PUM
		,	enyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta erjasama Daerah		
		a)	Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 215.696.000	
			engembangan dan Penataan Wilayah Administrasi In Perbatasan		
		a)	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota	Rp 200.000.000	
		b)	Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 230.470.000	
			asilitasi Pencegahan dan Penanggulangan encana		
		a)	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR	Rp 750.000.000	

NO		DA	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
	c)	PEN	NATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
			a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 151.374.000	
	d)		MBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1)	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
			 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS 	Rp 100.000.000	
		2)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
			a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
			a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan	Rp 100.000.000	
		4)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
			a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	
		5)	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
			a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 6.188.868.000	
		6)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 85.100.000	
	е)		NDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
		6)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
			a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 144.000.000	
10.	PR	OVIN	SI LAMPUNG	Rp 14.026.340.000	
	a)	TUC	KUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN BAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM BERI		SETJEN
		1)	Perencanaan Program dan Anggaran		
			 a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri 	Rp 225.000.000	

)		DA	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
			2	3	4
	b)	PEN UMI	NGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UM		DITJEN PUM
		1)	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
			a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 227.000.000	
	c)	PEN	NATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
			a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 339.942.000	
	d)		NGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI ERAH		DITJEN OTDA
		1)	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
			a) Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP	Rp 2.591.328.000	
	e)		MBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1)	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
		2)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
			a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
			 a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW 	Rp 810.000.000	
		4)	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
			a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 9.304.200.000	
		5)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 84.070.000	
Ī	f)		IDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
f		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
			Teknis Lainiya Dadan Dikiat		

NO		DAER	AH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
11.	PR	OVINSI E	BANTEN	Rp 11.068.992.000	
	a)		IGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN STEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM		SETJEN
		1) Pe	rencanaan Program dan Anggaran		
		a)	Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 200.000.000	
	b)	PENGL UMUM	JATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN		DITJEN PUM
			nyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta rjasama Daerah		
		a)	Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 212.000.000	
		b)	Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	Rp 300.000.000	
	c)	PENAT	AAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
			kungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas knis Lainnya Ditjen Dukcapil		
		a)	Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 332.054.000	
	d) PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH			DITJEN OTDA	
			ngembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja erah		
		b)	Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP	Rp 2.076.640.000	
	е)		RDAYAAN MASYARAKAT DAN RINTAHAN DESA		DITJEN PMD
			silitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya asyarakat		
		a)	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
			ningkatan Kapasitas Penyelenggaraan merintahan Desa dan Kelurahan		
		a)	Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa		
		3) Pe	ngembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp 200.000.000	
		a)	Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	

NO		DA	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
		4)	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
			a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 7.188.248.000	
		5)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 81.850.000	
	f)		NDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
			a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 128.200.000	
12.	PR	OVIN	SI DKI JAKARTA	Rp 320.188.000	
	a)	PEN	NGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UM		DITJEN PUM
		1)	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
			Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 157.000.000	
		2)	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
			a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 163.188.000	
13.	PR	OVIN	SI JAWA BARAT	Rp 29.445.613.000	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI			SETJEN	
		1)	Perencanaan Program dan Anggaran		
			 a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri 	Rp 225.000.000	
		2)	Pengelolaan Data, Informasi,Komunikasi dan Telekomunikasi		
			 Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government 	Rp 142.755.000	
	b)	PEN	NGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UM		DITJEN PUM
		1)	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
			Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 247.000.000	
		2)	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
			 Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota 	Rp 200.000.000	

NO		DA	ERA	.H/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1				2	3	4
			b)	Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 832.398.000	
	c)	PEN		AAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		1)	Tela)	kungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas knis Lainnya Ditjen Dukcapil Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 1.048.100.000	
	d)			RDAYAAN MASYARAKAT DAN INTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1)		silitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya syarakat Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja	Rp 100.000.000	
			,	Penanggulangan HIV/AIDS	κρ 100.000.000	
		2)		ningkatan Kapasitas Penyelenggaraan merintahan Desa dan Kelurahan		
			a)	Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	a)	ngembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 810.000.000	
		4)	Per	ningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
			a)	PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 25.409.360.000	
		5)		kungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas knis Lainnya Ditjen PMD		
			a)	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 92.000.000	
	e) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI			BADAN DIKLAT		
		1)	Tel	kungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas knis Lainnya Badan Diklat		
			a)	Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 139.000.000	
14.	PR	OVIN	SI J	AWA TENGAH	Rp 28.106.329.000	
	a) DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI			SETJEN		
		1)	Per	encanaan Program dan Anggaran		
			a)	Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 250.000.000	
	b)	PEN UMI	UM	ATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN		DITJEN PUM
		1)		nyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta jasama Daerah		

NO		DAE	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
			a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 257.000.000	
		2)	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
			 Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota 	Rp 300.000.000	
		3)	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR	Rp 800.000.000	
	c)	PEN	ATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
			a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 1.353.095.000	
	PEMERINT		IBERDAYAAN MASYARAKAT DAN IERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1)	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
			 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS 	Rp 100.000.000	
		2)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
			a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
			a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 810.000.000	
		4)	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
			a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 23.773.174.000	
		5)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 96.060.000	
	f)		DIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
			a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 167.000.000	

		DA	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
			2	4	
ī	PRC	VIN	SI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Rp 8.353.430.000	
á	a)	TU(KUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN GAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM GERI		SETJEN
		1)	Perencanaan Program dan Anggaran		
			 a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri 	Rp 200.000.000	
ŀ	b)	PEN UM	NGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UM		DITJEN PUM
		1)	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
			Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 247.000.000	
		2)	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
			a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR	Rp 750.000.000	
(c)	PEN	NATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
			a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 107.740.000	
•	d)		NGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI ERAH		DITJEN OTDA
		1)	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
			Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP	Rp 2.152.560.000	
•	e)		MBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1)	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
		2)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
			a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
			 a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW 	Rp 530.000.000	

NO		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1		2	3	4
		4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
		a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 3.847.830.000	
		5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
		a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 89.100.000	
	f)	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
		Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
		a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 129.200.000	
16.	PR	OVINSI JAWA TIMUR	Rp 36.097.253.000	
	a)	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
		Perencanaan Program dan Anggaran		
		 a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri 	Rp 250.000.000	
	b) PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM			DITJEN PUM
	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah			
		a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 261.746.000	
		b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	Rp 350.000.000	
	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana			
		a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 300.000.000	
		3) Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
		 a) Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota 	Rp 200.000.000	
		4) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan		
		 a) Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam 	Rp 400.000.000	
	c)	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		

NO		DAERAH/PROGRA	M/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
		Perkemba Pembangu	Undang-Undang No.52/2009 tentang ngan Kependudukan dan nan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 serta Monev Implementasi SIAK	Rp 1.285.647.000	
	d)	PENGELOLAAN DE DAERAH	SENTRALISASI DAN OTONOMI		DITJEN OTDA
		Daerah	n Kapasitas dan Evaluasi Kinerja		
			ngan Kapasitas Berkelanjutan Untuk sasi-SCBDP	Rp 2.634.702.000	
	е)	PEMBERDAYAAN I PEMERINTAHAN D	MASYARAKAT DAN ESA		DITJEN PMD
		Masyarakat	erdayaan Adat dan Sosial Budaya		
		Penanggul	enguatan Kelembagaan Pokja angan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
			apasitas Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan		
		a) Peningkata	an Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3) Pengembangar	usaha Ekonomi Masyarakat		
			Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar K dan PNPM - PISEW	Rp 810.000.000	
		4) Peningkatan Ke	emandirian Masyarakat Perdesaan		
		a) PNPM - M	andiri Perdesaan	Rp 29.205.558.000	
		5) Dukungan Man Teknis Lainnya	ajemen Dan Pelaksanaan Tugas Ditjen PMD		
		a) Fasilitasi P	enguatan Kelembagaan PMD	Rp 99.600.000	
17.	PR	VINSI BALI		Rp 6.746.863.000	
	a)	DUKUNGAN MANA	JEMEN DAN PELAKSANAAN INNYA KEMENTERIAN DALAM		SETJEN
		1) Perencanaan P	rogram dan Anggaran		
		,	n/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan ndalian DKTP dan UB Lingkup ri	Rp 200.000.000	
	b)		ELENGGARAN PEMERINTAHAN		DITJEN PUM
		 Penyelenggara Kerjasama Dae 	an Hubungan Pusat dan Daerah serta rah		
			an Peran Gubernur sebagai Wakil n Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 267.000.000	
		2) Fasilitasi Pence Bencana	gahan dan Penanggulangan		
		a) Pemberda	yaan Masyarakat dalam Pengurangan ncana-SCDRR	Rp 750.000.000	

NO		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1		2	3	4
	c)	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
		a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 190.469.000	
	d)	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
		a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
		a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		 a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW 	Rp 530.000.000	
		4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
		a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 4.266.424.000	
		5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
		a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 86.770.000	
	е)	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
		Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
		a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 156.200.000	
18.	PRO	OVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp 12.435.196.000	
	a)	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
		Perencanaan Program dan Anggaran		
		a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 200.000.000	
	b)	PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
		Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
		a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 231.076.000	

NO		DAI	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
		2)	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
			 Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga 	Rp 300.000.000	
	c)	PEN	IATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
			a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 199.582.000	
	d)		MBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1)	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
		2)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
			Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
			 a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW 	Rp 514.890.000	
		4)	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
			a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 10.422.378.000	
		5)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 85.570.000	
	е)		IDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
			a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 181.700.000	
19.	PR	OVIN	SI KALIMANTAN TENGAH	Rp 11.017.396.000	
	a)	TUG	KUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN BAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM BERI		SETJEN
		1)	Perencanaan Program dan Anggaran		

NO		DAERAH/	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
		d	Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan lan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 175.000.000	
	b)	PENGUAT UMUM	AN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN		DITJEN PUM
			elenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta sama Daerah		
			Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 224.948.000	
		b) F	Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	Rp 300.000.000	
	c)	PENATAA	N ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
			ngan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas s Lainnya Ditjen Dukcapil		
		F F K	Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 171.594.000	
	d)		DAYAAN MASYARAKAT DAN TAHAN DESA		DITJEN PMD
			asi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya arakat		
			Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
			gkatan Kapasitas Penyelenggaraan rintahan Desa dan Kelurahan		
		a) F	Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		, ,	embangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		a) L	embaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 565.240.000	
		4) Penin	gkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
		a) F	PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 9.194.234.000	
			ngan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas s Lainnya Ditjen PMD		
		a) F	asilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 86.380.000	
20.	PRO	OVINSI KAL	IMANTAN SELATAN	Rp 10.431.372.000	
	a)		AN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN EKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM		SETJEN
		1) Peren	canaan Program dan Anggaran		
		, d	Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan lan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 200.000.000	

NO		DAI	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1		2 3			4
	b)	UMU			DITJEN PUM
		1)	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
			a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 240.102.000	
		2)	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
			Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 305.889.000	
		3)	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
			 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana 	Rp 300.000.000	
	c)	PEN	IATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN ADMINDUK
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
			a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 196.066.000	
	d)		MBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1)	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
		2)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
			a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
			 a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW 	Rp 595.090.000	
		4)	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
			a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 8.027.305.000	
		5)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 86.620.000	
	e)		IDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
			a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 180.300.000	

NO		DA	RAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB K	EGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4	
21.	PR	OVIN	I KALIMANTAN TIMUR		Rp 12.127.219.000	
	a)		UNGAN MANAJEMEN DAN PELAKS AS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIA ERI			SETJEN
		1)	Perencanaan Program dan Anggaran			
			 Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian DKTP dan UB Kemendagri 		Rp 175.000.000	
		2)	Pengelolaan Data, Informasi,Komunik Telekomunikasi	asi dan		
			Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Penyelenggaraan E-Government		Rp 302.760.000	
	b)	PEI UM	GUATAN PENYELENGGARAN PEM M	ERINTAHAN		DITJEN PUM
		1)	Penyelenggaraan Hubungan Pusat da Kerjasama Daerah	n Daerah serta		
			 Peningkatan Peran Gubernur sek Pemerintah Pusat di Wilayah Pro 		Rp 267.000.000	
		2)	Pengembangan dan Penataan Wilaya dan Perbatasan	h Administrasi		
			 Pembinaan dan Pembakuan Nan Rupabumi Wilayah Administrasi 	na-nama	Rp 317.266.000	
			b) Fasilitasi Penegasan Status Huku Negara, Peningkatan Kapasitas A Peningkatan Kegiatan Sosekbud Negara Tetangga	Aparatur, dan	Rp 250.000.000	
	c)	PEI	ATAAN ADMINISTRASI KEPENDUD	UKAN		DITJEN DUKCAPIL
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksana Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil	aan Tugas		
			 Sosialisasi Undang-Undang No.5 Perkembangan Kependudukan d Pembangunan Keluarga, Penerb Kab/Kota serta Monev Implemen Kab/Kota 	an tan NIK di 168	Rp 181.932.000	
	d)		BERDAYAAN MASYARAKAT DAN ERINTAHAN DESA			DITJEN PMD
		1)	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan So Masyarakat	sial Budaya		
			 Fasilitasi Penguatan Kelembagaa Penanggulangan HIV/AIDS 	ın Pokja	Rp 100.000.000	
		2)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggar Pemerintahan Desa dan Kelurahan	aan		
			a) Peningkatan Kapasitas bagi Kep	ala Desa	Rp 200.000.000	

NO		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA	
1				2	3	4
		3)	Pengemban	gan Usaha Ekonomi Masyarakat		
				ga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar KPK dan PNPM - PISEW	Rp 530.000.000	
		4)	Peningkatan	Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
			a) PNPM -	- Mandiri Perdesaan	Rp 9.715.021.000	
		5)		lanajemen Dan Pelaksanaan Tugas nya Ditjen PMD		
			a) Fasilitas	si Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 88.240.000	
22.	PRO	OVIN	SI SULAWES	SI UTARA	Rp 14.241.229.000	
	a)		AS TEKNIS	NAJEMEN DAN PELAKSANAAN LAINNYA KEMENTERIAN DALAM		SETJEN
		1)	Perencanaa	n Program dan Anggaran		
			,	aan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan ngendalian DKTP dan UB Lingkup dagri	Rp 220.000.000	
			Telekomunik			
				si Pembinaan Pemerintah Daerah dalam enggaraan E-Government	Rp 280.940.000	
	b)	PEN UM		ENYELENGGARAN PEMERINTAHAN		DITJEN PUM
		1)	Penyelengga Kerjasama [araan Hubungan Pusat dan Daerah serta Daerah	1	
				katan Peran Gubernur sebagai Wakil ntah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 272.000.000	
				aan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas ntahan Umum di Kecamatan	Rp 300.000.000	
		2)	dan Perbata			
			Negara Peningl	si Penegasan Status Hukum Batas Antar , Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan katan Kegiatan Sosekbud dengan Tetangga	Rp 300.000.000	
		3)	Pembinaan (Pertanahan	dan Pengembangan Kawasan dan		
				katan Kapasitas Aparat Pemerintah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber lam	Rp 400.000.000	
		4)	Bencana	ncegahan dan Penanggulangan		
				rdayaan Masyarakat dalam Pengurangar Bencana-SCDRR	Rp 800.000.000	

NO		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1		2	3	4
	c)	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil 		
		 a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 166 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota 		
	d)	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		 Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat 		
		 a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS 	Rp 100.000.000	
		 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 		
		a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
		a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan	Rp 125.000.000	
		4) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 810.000.000	
		5) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
		a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 9.929.990.000	
		6) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
		a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 94.570.000	
	е)	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
		Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
		a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 197.000.000	
23.	PR	OVINSI GORONTALO	Rp 6.958.518.000	
	a)	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
		1) Perencanaan Program dan Anggaran		
		 a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri 	Rp 230.000.000	

	DA	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
		2	3	4
b)		NGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UM		DITJEN PUM
	1)	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
		a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 232.384.000	
	2)	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
		a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 215.655.000	
c)	PEI	NATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
	1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
		 a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota 	Rp 147.614.000	
d)		MBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1)	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
		a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
	2)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
		a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
	3)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	
	4)	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
		a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 5.325.875.000	
	5)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
		a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 94.090.000	
е)		NDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
	1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
		a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 162.900.000	1

NO		DA	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
24.	PR	OVIN	SI SULAWESI TENGAH	Rp 13.040.045.000	
	a)	TU	KUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN GAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM GERI		SETJEN
		1)	Perencanaan Program dan Anggaran		
			 a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri 	Rp 250.000.000	
		2)	Pengelolaan Data, Informasi,Komunikasi dan Telekomunikasi		
			a) Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government	Rp 217.590.000	
	b)	PEI UM			DITJEN PUM
		1)	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
			Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 257.000.000	
		2)	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
			 Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota 	Rp 200.000.000	
		3)	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
			 a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR 	Rp 800.000.000	
	c)	PEI	NATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
			a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 211.188.000	
	d)		MBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1)	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
		2)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
			a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		

NO		DA	AERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
			 b) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW 	Rp 250.000.000	
		4)	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
			a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 10.229.687.000	
		5)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 90.880.000	
	d)		NDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
			a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 233.700.000	
25.	PRO	OVIN	ISI SULAWESI BARAT	Rp 7.363.025.000	
	a)	TU NE	KUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN GAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM GERI		SETJEN
		1)	Perencanaan Program dan Anggaran		
			 a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri 	Rp 220.000.000	
	b)		NGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN IUM		DITJEN PUM
		1)	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
			 Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 	Rp 257.000.000	
			b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	Rp 350.000.000	
		2)	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
			 Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota 	Rp 200.000.000	
		3)	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
			 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana 	Rp 300.000.000	
	c)	PE	NATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		

NO		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1		2	3	4
		 a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota 	Rp 166.925.000	
	d)	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
		a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
		a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 506.140.000	
		4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
		a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 4.804.190.000	
		5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
		a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 90.670.000	
	е)	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
		Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
		a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 168.100.000	
26	PRO	OVINSI SULAWESI TENGGARA	Rp 16.147.939.000	
	a)	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
		1) Perencanaan Program dan Anggaran		
		 a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri 	Rp 200.000.000	
	b)	PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
		Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		

NO		DA	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
			 Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 	Rp 222.929.000	
			b) Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan	Rp 300.000.000	
		2)	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
			a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 300.000.000	
	c)	PEI	NATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
			 a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota 	Rp 175.092.000	
	d)		NGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI ERAH		DITJEN OTDA
		1)	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
			 Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP 	Rp 2.560.091.000	
	е)		MBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1)	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
			 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS 	Rp 100.000.000	
		2)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
			a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
			a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan	Rp 75.000.000	
		4)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
			 a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW 	Rp 250.000.000	
		5)	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
			a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 11.518.637.000	
		6)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 90.190.000	

NO		DA	ERA	NH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1				2	3	4
	f)			DIKAN DAN PELATIHAN APARATUR TERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
		1)		kungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas knis Lainnya Badan Diklat		
			a)	Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 156.000.000	
27	PRO	OVIN	ISI S	ULAWESI SELATAN	Rp 18.319.227.000	
	a)	TU	GAS GER			SETJEN
		1)	Pei	rencanaan Program dan Anggaran		
			a)	Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 200.000.000	
	b)	PEI UM		ATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN		DITJEN PUM
		1)		nyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta rjasama Daerah		
			a)	Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 264.264.000	
			b)	Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	Rp 300.000.000	
		2)		ngembangan dan Penataan Wilayah Administrasi n Perbatasan		
			a)	Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota	Rp 200.000.000	
		3)	_	silitasi Pencegahan dan Penanggulangan ncana		
			a)	Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 300.000.000	
		4)		mbinaan dan Pengembangan Kawasan dan rtanahan		
			a)	Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam	Rp 400.000.000	
	c)	PEI	VAT	AAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		1)		kungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas knis Lainnya Ditjen Dukcapil		
			a)	Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 303.430.000	

NO		DAI	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
	d)		IBERDAYAAN MASYARAKAT DAN IERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1)	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
		2)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
			a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
			a) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan	Rp 75.000.000	
		4)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
			a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 565.240.000	
		5)	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
			a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 15.149.523.000	
		6)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 94.070.000	
	е)		IDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
			a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 167.700.000	
28	PR	NIVC	SI NUSA TENGGARA BARAT	Rp 12.861.314.000	
	a)	TUG	KUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN BAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM BERI		SETJEN
		1)	Perencanaan Program dan Anggaran		
			a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 250.000.000	
	b)	PEN UMU	IGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN JM		DITJEN PUM
		1)	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
			a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 242.000.000	
			b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	Rp 300.000.000	
		2)	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		

NO		DA	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
			 Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Secara Pasti di Lapangan Antar Daerah Prov. dan Kab/Kota 	Rp 200.000.000	
		3)	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
			a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 300.000.000	
			Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan		
		4)	a) Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Sumber Daya Alam	Rp 400.000.000	
	c)		NATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
			a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 194.830.000	
	d)		NGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI ERAH		DITJEN OTDA
		1)	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
			 Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi-SCBDP 	Rp 2.217.600.000	
	е)		MBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1)	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
		2)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
			a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
			a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 565.240.000	
		4)	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
			a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 7.208.624.000	
		5)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 474.620.000	

NO		DA	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
	f)		NDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
			a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 208.400.000	
29	PRO	OVIN	SI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 26.542.561.000	
	a)	TU	KUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN GAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM GERI		SETJEN
		1)	Perencanaan Program dan Anggaran		
			 a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri 	Rp 220.000.000	
		2)	Pengelolaan Data, Informasi,Komunikasi dan Telekomunikasi		
			 Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government 	Rp 349.760.000	
	b)	PEI UM	NGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UM		DITJEN PUM
		1)	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
			 Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 	Rp 248.073.000	
			b) Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan	Rp 350.000.000	
		2)	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
			 a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi 	Rp 513.974.000	
			b) Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga	Rp 300.000.000	
		3)	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
			 a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR 	Rp 800.000.000	
	c)	PEI	NATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		

NO		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1		2	3	4
		 a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota 	Rp 275.700.000	
	d)	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
		a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
		a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 250.000.000	
		4) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
		a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 22.656.934.000	
		5) Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
		a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 96.920.000	
	е)	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR KEMENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
		Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
		a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 181.200.000	
30	PRO	OVINSI MALUKU	Rp 11.716.222.000	
	a)	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM NEGERI		SETJEN
		1) Perencanaan Program dan Anggaran		
		 a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri 	Rp 220.000.000	
	b)	PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
		Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
		a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 287.000.000	
		b) Pengembangan Kerjasama Ekonomi Daerah	Rp 300.000.000	

0		DA	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONE PEMBINA
			2	3	4
		2)	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
			a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi	Rp 221.460.000	
		3)	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
			a) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana-SCDRR	Rp 800.000.000	
ŀ	c)	PEN	IATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPI
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
			a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 289.032.000	
	d)		MBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MERINTAHAN DESA		DITJEN
•		1)	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		PMD
•			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
		2)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
			a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
		4)	PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesaan		
		5)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
			 a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW 	Rp 250.000.000	
		6)	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
			a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 8.776.950.000	
		7)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
ŀ			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 95.980.000	
}	e)		IDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
}		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
ŀ			a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 175.800.000	

NO		DAE	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
31	PRO	OVINS	SI MALUKU UTARA	Rp 8.956.616.000	
	a)		UNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN AS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM ERI		SETJEN
		1)	Perencanaan Program dan Anggaran		
			a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri	Rp 220.000.000	
	b)	PEN UMU	GUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN JM		DITJEN PUM
		1)	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		. 5
			a) Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi	Rp 281.772.000	
			b) Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan	Rp 300.000.000	
		2)	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
			a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Usaha Pengurangan Resiko Bencana	Rp 300.000.000	
	c)	PEN	ATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
			a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 242.032.000	
	d)		IBERDAYAAN MASYARAKAT DAN IERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1)	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS	Rp 100.000.000	
		2)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
			a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
			a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW	Rp 530.000.000	
		4)	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
			a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 6.478.632.000	
		5)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 97.180.000	

NO		DA	ERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
	e)		NDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
			a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 207.000.000	
32	PRO	OVIN	ISI PAPUA	Rp 56.962.673.000	
	a)	TU	KUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN GAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN DALAM GERI		SETJEN
		1)	Perencanaan Program dan Anggaran		
			 a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian DKTP dan UB Lingkup Kemendagri 	Rp 220.000.000	
		2)	Pengelolaan Data, Informasi,Komunikasi dan Telekomunikasi		
			 Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan E-Government 	Rp 517.275.000	
	b)	PEI UM	NGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UM		DITJEN PUM
		1)	Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah		
			 Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi 	Rp 257.000.000	
			 Pembinaan Wilayah dan Pemberdayaan Tugas Pemerintahan Umum di Kecamatan 	Rp 350.000.000	
		2)	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan		
			 a) Pembinaan dan Pembakuan Nama-nama Rupabumi Wilayah Administrasi 	Rp 630.452.000	
			b) Fasilitasi Penegasan Status Hukum Batas Antar Negara, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan Peningkatan Kegiatan Sosekbud dengan Negara Tetangga	Rp 300.000.000	
	c)	PE	NATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		DITJEN DUKCAPIL
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil		
			a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota	Rp 419.250.000	

NO		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB K	EGIATAN ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1		2	3	4
	d)	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		 Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan So Masyarakat 	osial Budaya	
		 a) Fasilitasi Penguatan Kelembaga Penanggulangan HIV/AIDS 	an Pokja Rp 100.000.000	
		 Peningkatan Kapasitas Penyelenggar Pemerintahan Desa dan Kelurahan 	aan	
		a) Peningkatan Kapasitas bagi Kep	ala Desa Rp 200.000.000	
		3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
		4) PNPM - Lingkungan Mandiri Perdesa	an	
		5) Pengembangan Usaha Ekonomi Mas	yarakat	
		 a) Lembaga Keuangan Mikro Perde Desa, TKPK dan PNPM - PISEW 		
		6) Peningkatan Kemandirian Masyaraka	t Perdesaan	
		a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 53.605.666.000	
		 Dukungan Manajemen Dan Pelaksan Teknis Lainnya Ditjen PMD 	aan Tugas	
		a) Fasilitasi Penguatan Kelembaga	an PMD Rp 113.030.000	
33	PRO	VINSI PAPUA BARAT	Rp 24.084.704.000	
	a)	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAK TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIA NEGERI	AN DALAM	SETJEN
		Perencanaan Program dan Anggaran		
		 a) Pembinaan/Fasilitasi Koordinasi dan Pengendalian DKTP dan UE Kemendagri 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	b)	PENGUATAN PENYELENGGARAN PEM UMUM		DITJEN PUM
		Penyelenggaraan Hubungan Pusat da Kerjasama Daerah		
		 a) Peningkatan Peran Gubernur sel Pemerintah Pusat di Wilayah Pro 		
		 Pengembangan dan Penataan Wilaya dan Perbatasan 		
		 a) Pembinaan dan Pembakuan Nar Rupabumi Wilayah Administrasi 	ma-nama Rp 373.365.000	
	c)	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUD		DITJEN DUKCAPIL
		 Dukungan Manajemen Dan Pelaksan Teknis Lainnya Ditjen Dukcapil 	aan Tugas	

NO		DA	AERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
			 a) Sosialisasi Undang-Undang No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Penerbitan NIK di 168 Kab/Kota serta Monev Implementasi SIAK Kab/Kota 	Rp 234.294.000	
	d)		MBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1)	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat		
			 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS 	Rp 100.000.000	
		2)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
			a) Peningkatan Kapasitas bagi Kepala Desa	Rp 200.000.000	
		3)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
			 a) Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM - PISEW 	Rp 250.000.000	
		4)	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan		
			a) PNPM - Mandiri Perdesaan	Rp 22.113.795.000	
		5)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMD		
			a) Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PMD	Rp 101.250.000	
	e)		NDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MENTERIAN DALAM NEGERI		BADAN DIKLAT
		1)	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Diklat		
			a) Koordinasi Pembinaan Program Kediklatan	Rp 260.000.000	

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDOENSIA,

GAMAWAN FAUZI

LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR: 66 Tahun 2010 TANGGAL: 31 Desember 2010

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK MASING-MASING PROVINSI

NO		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1		2	3	4
1.	PR	OVINSI ACEH	Rp 11.500.000.000	
	a.	PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
		Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
		 Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana 		
		- Kab. Aceh Utara	Rp 1.500.000.000	
	b.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
		 Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya 		
		- Kab. Aceh Timur	Rp 2.675.000.000	
		- Kab. Aceh Tengah	Rp 2.675.000.000	
		- Kab. Aceh Selatan	Rp 1.650.000.000	
	C.	BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
		 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Bina Bangda 		
		a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah		
		- Kab. Aceh Besar	Rp 3.000.000.000	
2.	PR	OVINSI SUMATERA UTARA	Rp 36.643.697.000	
	a.	PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
		Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
		a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP		
		- Kab. Karo	Rp 4.296.569.000	
		- Kab. Tapanuli Tengah	Rp 1.894.788.000	

NO		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1		2	3	4
	b.	PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
		Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
		 a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana 		
		- Kab. Serdang Bedagai	Rp 1.290.000.000	
	C.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
		a) Pembangunan Kantor Desa		
		- Kab. Labuan Batu Utara	Rp 600.000.000	
		2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
		- Kab. Tanah Karo	Rp 312.340.000	
		3) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
		 Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya 		
		- Kab. Phak Phak Barat	Rp 5.750.000.000	
		- Kab. Tapanuli Selatan	Rp 5.750.000.000	
		- Kab. Mandaling Barat	Rp 5.750.000.000	
	d.	BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
		 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Bina Bangda 		
		 a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah 		
		- Kab. Asahan	Rp 2.000.000.000	
		- Kab. Labuhan Batu	Rp 7.000.000.000	
		- Kota Padang Asahan	Rp 2.000.000.000	
3.	PR	OVINSI SUMATERA BARAT	Rp 22.800.000.000	
	a.	PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
		Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		
		a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR		
		- Kab. Tanah Datar	Rp 100.000.000	
		- Kab. Solok	Rp 100.000.000	

NO		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1		2	3	4
	b.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
		 Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya 		
		- Kab. Pasaman	Rp 5.750.000.000	
		- Kab. Solok Selatan	Rp 5.750.000.000	
		- Kab. Pesisir Selatan	Rp 2.675.000.000	
		- Kab. Padang Pariaman	Rp 2.675.000.000	
		- Kab. Agam	Rp 5.750.000.000	
4.	PR	OVINSI RIAU	Rp424.680.000	
7.	a.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	110424.000.000	DITJEN PMD
		PEMERINTAHAN DESA		
		1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
		- Kab. Indragiri Hilir	Rp 212.340.000	
		- Kab. Siak	Rp 212.340.000	
			<u> </u>	
5.	PR	OVINSI BENGKULU	Rp 13.987.340.000	
5.	PR a.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 13.987.340.000	DITJEN PMD
5.		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp 13.987.340.000	DITJEN PMD
5.		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
5.		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Kepahiang	Rp 13.987.340.000 Rp 212.340.000	DITJEN PMD
5.		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Kepahiang 2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		DITJEN PMD
5.		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Kepahiang		DITJEN PMD
5.		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Kepahiang 2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat		DITJEN PMD
5.		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Kepahiang 2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya	Rp 212.340.000	DITJEN PMD
5.		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Kepahiang 2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Kab. Bengkulu Utara	Rp 212.340.000 Rp 2.675.000.000	DITJEN PMD
5.		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Kepahiang 2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Kab. Bengkulu Utara - Kab. Bengkulu Selatan	Rp 212.340.000 Rp 2.675.000.000 Rp 1.650.000.000	DITJEN PMD
6.	a.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Kepahiang 2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Kab. Bengkulu Utara - Kab. Bengkulu Selatan - Kab. Kaur	Rp 212.340.000 Rp 2.675.000.000 Rp 1.650.000.000 Rp 5.750.000.000	DITJEN PMD
	a.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Kepahiang 2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Kab. Bengkulu Utara - Kab. Bengkulu Selatan - Kab. Kaur - Kab. Lebong	Rp 212.340.000 Rp 2.675.000.000 Rp 1.650.000.000 Rp 5.750.000.000 Rp 3.700.000.000	DITJEN PMD
	a.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Kepahiang 2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Kab. Bengkulu Utara - Kab. Bengkulu Selatan - Kab. Kaur - Kab. Lebong OVINSI JAMBI PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM 1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Rp 212.340.000 Rp 2.675.000.000 Rp 1.650.000.000 Rp 5.750.000.000 Rp 3.700.000.000	
	a.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Kepahiang 2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya - Kab. Bengkulu Utara - Kab. Bengkulu Selatan - Kab. Kaur - Kab. Lebong OVINSI JAMBI PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM 1) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan	Rp 212.340.000 Rp 2.675.000.000 Rp 1.650.000.000 Rp 5.750.000.000 Rp 3.700.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
7.	PROVINSI SUMATERA SELATAN	Rp3.248.857.000	
	PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI a. DAERAH		DITJEN OTDA
	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja 1) Daerah		
	Pengembangan kapasitas untuk a) Desentralisasi-SCBDP		
	- Kab. OKU	Rp 2.924.177.000	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN b. PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Banyuasin	Rp 212.340.000	
	- Kab. Ogan Ilir	Rp 112.340.000	
8.	PROVINSI LAMPUNG	Rp3.194.249.000	
	PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI a. DAERAH		DITJEN OTDA
	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja 1) Daerah		
	Pengembangan kapasitas untuk a) Desentralisasi-SCBDP		
	- Kab. Lampung Selatan	Rp 1.857.229.000	
	PENGUATAN PENYELENGGARAN b. PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan 1) Bencana		
	a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana		
	- Kab. Tulang Bawang	Rp 1.000.000.000	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN c. PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	 Kab. Lampung Selatan 	Rp 112.340.000	
	- Kab. Tanggamus	Rp 112.340.000	
	- Kab. Pesawaran	Rp 112.340.000	
9.	PROVINSI BANTEN	Rp3.348.558.000	
	PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI a. DAERAH		DITJEN OTDA
	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		

NO		DAE	RAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1			2	3	4
			a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR		
			- Kab. Lebak	Rp 100.000.000	
		2)	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
			Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP		
			- Kab. Pandeglang	Rp 2.848.558.000	
	b.		MBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1)	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
			a) Pembangunan Kantor Desa		
			- Kab. Pandeglang	Rp 400.000.000	
10.	PR	OVIN	SI JAWA BARAT	Rp 10.138.067.000	
	a.		NGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI ERAH		DITJEN OTDA
		1)	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		
			 a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR 		
			- Kab. Bandung	Rp 100.000.000	
		2)	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
			 Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP 		
			- Kota Cirebon	Rp 1.805.974.000	
			- Kab. Kuningan	Rp 3.041.728.000	
			- Kab. Cirebon	Rp 2.052.781.000	
			- Kab. Subang	Rp 2.688.224.000	
	b.	PEN	MBERDAYAAN MASYARAKAT DAN MERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1)	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
			a) Sarana Prasarana Pasar Desa	B	
			- Kab. Sukabumi	Rp 112.340.000	
			- Kab. Cianjur	Rp 112.340.000	
			- Kab. Garut	Rp 112.340.000	
	-		- Kab. Karawang	Rp 112.340.000	
11.	PR	OVIN	SI JAWA TENGAH	Rp 11.142.581.000	
	a.		NGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI ERAH		DITJEN OTDA
	<u> </u>	1)	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		2:27:
	1	٠,		I	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan a) Daerah-ILGR		
	- Kab. Kebumen	Rp 100.000.000	
	- Kab. Magelang	Rp 100.000.000	
	Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja 2) Daerah		
	Pengembangan kapasitas untuk a) Desentralisasi-SCBDP		
	- Kab. Wonogiri	Rp 2.729.158.000	
	- Kab. Banjarnegara	Rp 3.254.374.000	
	- Kab. Klaten	Rp 1.867.132.000	
	- Kab. Sragen	Rp 2.542.557.000	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN b. PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Pati	Rp 212.340.000	
	- Kab. Cilacap	Rp 112.340.000	
	- Kab. Klaten	Rp 112.340.000	
	- Kab. Banjarnegara	Rp 112.340.000	
12.	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Rp424.680.000	
	PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI a. DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		
	Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan a) Daerah-ILGR		
	- Kab. Bantul	Rp 100.000.000	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN b. PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Bantul	Rp 112.340.000	
	- Kab. Gunung Kidul	Rp 212.340.000	
13.	PROVINSI JAWA TIMUR	Rp 19.721.962.000	
	PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI a. DAERAH		DITJEN OTDA
	1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		
	Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan a) Daerah-ILGR		
	- Kab. Ngawi	Rp 100.000.000	
	- Kab. Lamongan	Rp 100.000.000	

Pengembangan kapasitas dan Evaluasi Kinerja	NO		DAE	ERAH	I/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
Deerath Pengembangan kapasitas untuk 1 Desentralisasi-SCBDP - Kab. Nganjuk Rp 2.008.174.000 - Kab. Sojonegoro Rp 2.646.507.000 - Kab. Gresik Rp 2.304.941.000 - Kab. Sampang Rp 2.331.216.000 - Kab. Kediri Rp 2.417.498.000 - Kab. Kediri Rp 2.417.498.000 - Kab. Kediri Rp 2.964.266.000 Rp 2.964.266.00	1				2	3	4
1) Desentralisasis-SCBDP			b.				
- Kab. Bojonegoro Rp 2.646.507.000 - Kab. Cresik Rp 2.304.941.000 - Kab. Sampang Rp 2.934.216.000 - Kab. Sampang Rp 2.931.216.000 - Kab. Kediri Rp 2.417.498.000 - Kota Malang Rp 2.964.266.000 - Kota Malang Rp 2.964.266.000 - PENGUATAN PENYELENGGARAN C. PEMERINTAHAN UMUM - Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan - Parov. Jawa Timur Rp 2.000.000.000 - Kab. Ponorogo Rp 1.000.000.000 - Kab. Ponorogo Rp 1.000.000.000 - Kab. Ponorogo Rp 1.000.000.000 - Kab. Pemerintahan Desa - Premerintahan Desa - Sampanganan Rantor Desa - Kab. Magetan Rp 2.000.000.000 - Rp 1.000.000.000 - Rp 2.000.000.000 - Rp 1.000.000.000 - Rp 2.000.000.000				1)			
- Kab. Gresik Rp 2.304.941.000 - Kab. Sampang Rp 2.931.216.000 - Kab. Kediri Rp 2.417.498.000 - Kota Malang Rp 2.941.7498.000 - Kota Malang Rp 2.964.266.000 PENGUATAN PENYELENGGARAN c. PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Prov. Jawa Timur Rp 2.000.000.000 - Kab. Ponorogo Rp 1.000.000.000 d. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Magetan Rp 600.000.000 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Gresik Rp 112.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 12.340.000 - Kab. Magetan Rp 2212.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Rp 212.340.000 - Kab. Magetan Rp Pengulatan Rp 212.340.000 - Rp 212.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Rp 212.340.000 - Rp 212.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Rp 212.340.000					- Kab. Nganjuk	Rp 2.008.174.000	
- Kab. Sampang Rp 2.931.216.000 - Kab. Kediri Rp 2.417.498.000 - Kota Malang Rp 2.964.266.000 - PENGUATAN PENYELENGGARAN C. PEMERINTAHAN UMUM DITJEN PUM Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan 1) Bencana a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Prov. Jawa Timur Rp 2.000.000.000 - Kab. Ponorogo Rp 1.000.000.000 d. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Magetan Rp 600.000.000 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Gresik Rp 112.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 14. PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rp5.437.020.000 19. Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000					• •	Rp 2.646.507.000	
- Kab. Kediri Rp 2.417.498.000 - Kota Malang Rp 2.964.266.000 PENGUATAN PENYELENGGARAN c. PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan 1) Bencana a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Prov. Jawa Timur Rp 2.000.000.000 - Kab. Ponorogo Rp 1.000.000.000 d. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Magetan Rp 600.000.000 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Gresik Rp 112.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Magetan Rp 5212.340.000 14. PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rp5.437.020.000 19. Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000					- Kab. Gresik	<u> </u>	
- Kota Malang Rp 2.964.266.000 PENGUATAN PENYELENGGARAN c. PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan 1) Bencana a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Prov. Jawa Timur Rp 2.000.000.000 - Kab. Ponorogo Rp 1.000.000.000 d. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Magetan Rp 600.000.000 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Gresik Rp 112.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 14. PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rp 5.437.020.000 19 Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) PemBangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000					- Kab. Sampang	Rp 2.931.216.000	
PENGUATAN PENYELENGGARAN c. PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan 1) Bencana a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Prov. Jawa Timur Rp 2.000.000.000 - Kab. Ponorogo Rp 1.000.000.000 d. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Magetan Rp 600.000.000 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Gresik Rp 112.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat - Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Pengembangan Rp 212.340.000 - Fab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Fab. Magetan Rp 212.340.000 - Fab. Magetan Rp 212.34					- Kab. Kediri	Rp 2.417.498.000	
c. PEMERINTAHAN UMUM Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan 1) Bencana a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Prov. Jawa Timur - Kab. Ponorogo Rp 1.000.000.000 d. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Magetan Rp 600.000.000 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Gresik Rp 112.340.000 - Kab. Pamekasan Rp 212.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Tab. Magetan Rp 212.340.000 - Rp 112.340.000 - Rp 212.340.000 - Rp 21.000.000.000					- Kota Malang	Rp 2.964.266.000	
1) Bencana a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana - Prov. Jawa Timur Rp 2.000.000.000 - Kab. Ponorogo Rp 1.000.000.000 d. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Magetan Rp 600.000.000 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Gresik Rp 112.340.000 - Kab. Pamekasan Rp 212.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Magetan Rp 5.437.020.000 14. PROVINSI KALIMANTAN BARAT PEMERINTAHAN UMUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000		C.		MER	INTAHAN UMUM		DITJEN PUM
Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana Prov. Jawa Timur Rp 2.000.000.000 Rp 1.000.000.000 d. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Magetan Rp 600.000.000 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Gresik Rp 112.340.000 - Kab. Pamekasan Rp 212.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 PROVINSI KALIMANTAN BARAT a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000			1)		ncana		
- Kab. Ponorogo d. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Magetan Rp 600.000.000 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Gresik Rp 112.340.000 - Kab. Pamekasan Rp 212.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Magetan Rp 212.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Magetan Rp 212.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Rp 212.340.000				a)	Pemerintahan dalam rangka Penanganan		
d. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Magetan Rp 600.000.000 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Gresik Rp 112.340.000 - Kab. Pamekasan Rp 212.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 14. PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rp5.437.020.000 14. PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rp5.437.020.000 19. Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000					- Prov. Jawa Timur	Rp 2.000.000.000	
PEMERINTAHAN DESA					- Kab. Ponorogo	Rp 1.000.000.000	
Pemerintahan Desa dan Kelurahan a) Pembangunan Kantor Desa - Kab. Magetan Rp 600.000.000 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Gresik Rp 112.340.000 - Kab. Pamekasan Rp 212.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 14. PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rp5.437.020.000 a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000		d.			_		DITJEN PMD
- Kab. Magetan Rp 600.000.000 2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Gresik Rp 112.340.000 - Kab. Pamekasan Rp 212.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 14. PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rp5.437.020.000 a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000			1)				
2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Gresik Rp 112.340.000 - Kab. Pamekasan Rp 212.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Rp 212.340.000 - Rp 212.340.000 - Rp 212.340.000 - Rp 212.340.000 DITJEN PUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000				a)	Pembangunan Kantor Desa		
a) Sarana Prasarana Pasar Desa - Kab. Gresik Rp 112.340.000 - Kab. Pamekasan Rp 212.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 14. PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rp5.437.020.000 a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000					- Kab. Magetan	Rp 600.000.000	
- Kab. Gresik Rp 112.340.000 - Kab. Pamekasan Rp 212.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 14. PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rp5.437.020.000 a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000			2)	Per	ngembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
- Kab. Pamekasan Rp 212.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 14. PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rp5.437.020.000 a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000				a)	Sarana Prasarana Pasar Desa		
- Kab. Pamekasan Rp 212.340.000 - Kab. Bojonegoro Rp 112.340.000 - Kab. Magetan Rp 212.340.000 14. PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rp5.437.020.000 a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000					- Kab. Gresik	Rp 112.340.000	
- Kab. Magetan Rp 212.340.000 14. PROVINSI KALIMANTAN BARAT a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000					- Kab. Pamekasan	Rp 212.340.000	
- Kab. Magetan Rp 212.340.000 14. PROVINSI KALIMANTAN BARAT a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000					- Kab. Bojonegoro	Rp 112.340.000	
14. PROVINSI KALIMANTAN BARAT a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp5.437.020.000 DITJEN PUM DITJEN PUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rp5.437.020.000 Rp5.437.020.000						Rp 212.340.000	
a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000							
PEMERINTAHAN UMUM 1) Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat DITJEN PUM PROMINION PUM RP 2.000.000.000	14.	PR				Rp5.437.020.000	
Perbatasan a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000		a.	PEI	MER	INTAHAN UMUM		DITJEN PUM
Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar - Prov. Kalimantan Barat Rp 2.000.000.000			1)	Per	batasan		
				a)	Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau		
- Kab. Kapuas Hulu Rp 1.000.000.000					- Prov. Kalimantan Barat	Rp 2.000.000.000	
					- Kab. Kapuas Hulu	Rp 1.000.000.000	
- Kota Singkawang Rp 1.200.000.000					- Kota Singkawang	Rp 1.200.000.000	

NO		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1		2	3	4
	b.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
		a) Pembangunan Kantor Desa		
		- Kab. Kubu Raya	Rp 600.000.000	
		Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
		- Kab. Kubu Raya	Rp 212.340.000	
		- Kab. Sintang	Rp 212.340.000	
		- Kab. Landak	Rp 212.340.000	
15.	PR	OVINSI KALIMANTAN SELATAN	Rp2.212.340.000	
	a.	PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
		Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
		 Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana 		
		- Prov. Kalimantan Selatan	Rp 2.000.000.000	
	b.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
		- Kab. Tanah Laut	Rp 212.340.000	
16.	PR	OVINSI KALIMANTAN TIMUR	Rp424.680.000	
	a.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
		- Kab. Nunukan	212.340.000	
		- Kab. Kutai Kertanegara	212.340.000	
17.	PR	OVINSI SULAWESI UTARA	12.612.340.000	
	a.	PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
		1) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		
		 a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR 		
		- Kab. Bolaang Mongondow	100.000.000	

NO	DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1	2	3	4
	b. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan		DITOLIA FOW
	Perbatasan		
	 a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 		
	- Kab. Kep. Sangihe	1.500.000.000	
	c. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
	a) Pembangunan Kantor Desa		
	- Kab. Bolaang Mongondow Timur	600.000.000	
	2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
	 a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya 		
	- Kab. Kep. Sangihe	3.700.000.000	
	- Kab. Minahasa	1.650.000.000	
	- Kab. Minahasa Utara	1.650.000.000	
	- Kab. Bolaang Mongondow	1.650.000.000	
	- Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.650.000.000	
	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
	a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
	- Kab. Minahasa	112.340.000	
18.	PROVINSI GORONTALO	100.000.000	
	a. PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	-	DITJEN OTDA
	Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		
	Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan a) Daerah-ILGR		
	- Kab. Boalemo	100.000.000	
19.	PROVINSI SULAWESI TENGAH	2.637.020.000	
	a. PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
	a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana		
	- Kota Palu	1.500.000.000	

NO		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1		2	3	4
	b.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
		a) Pembangunan Kantor Desa		
		- Kab. Parigi Moutong	600.000.000	
		2) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
		- Kab. Donggala	212.340.000	
		- Kab. Morowali	212.340.000	
		- Kab. Parigi Moutong	112.340.000	
20.	PR	OVINSI SULAWESI TENGGARA	15.426.910.000	
	a.	PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
		 Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah 		
		a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP		
		- Kab. Buton	2.898.951.000	
		- Kota Bau-Bau	3.103.279.000	
	b.	PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
		Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
		 a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana 		
		- Prov. Sulawesi Tenggara	2.000.000.000	
	C.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
		- Kab. Buton	212.340.000	
		- Kab. Kolaka	212.340.000	
		2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
		 Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya 		
		- Kab. Buton	3.700.000.000	
		- Kab. Kolaka	1.650.000.000	
1		- Kab. Muna	1.650.000.000	

NO		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1		2	3	4
21.	PR	OVINSI SULAWESI SELATAN	44.274.680.000	
	a.	PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
		Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I		
		 a) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah-ILGR 		
		- Kab. Bulukumba	100.000.000	
	b.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
		- Kab. Wajo	212.340.000	
		- Kab. Maros	212.340.000	
		2) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
		a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya		
		- Kab. Wajo	1.650.000.000	
		- Kab. Maros	1.650.000.000	
		- Kab. Tana Toraja	5.750.000.000	
		- Kab. Toraja Utara	4.100.000.000	
		- Kab. Luwu Utara	4.100.000.000	
	c.	BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Bina Bangda		
		a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah		
		- Kab. Wajo	2.000.000.000	
		- Kab. Maros	2.500.000.000	
		- Kab. Jeneponto	5.000.000.000	
		- Kab. Takalar	2.500.000.000	
		- Kab. Bantaeng	2.500.000.000	
		- Kab. Barru	2.000.000.000	
		- Kota Makassar	10.000.000.000	
22.	PR	OVINSI SULAWESI BARAT	6.600.000.000	
	a.	PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
		Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		

NO		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1		2	3	4
		a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana		
		- Prov. Sulawesi Barat	2.500.000.000	
	b.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		1) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
		 Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya 		
		- Kab. Mamasa	4.100.000.000	
23.	PR	OVINSI NUSA TENGGARA BARAT	5.696.825.000	
	a.	PENGELOLAAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH		DITJEN OTDA
		Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah		
		a) Pengembangan kapasitas untuk Desentralisasi-SCBDP		
		- Kab. Lombok Barat	2.778.286.000	
		- Kab. Lombok Tengah	1.981.519.000	
	b.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan		
		a) Pembangunan Kantor Desa		
		- Kab. Sumbawa	600.000.000	
		Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
		- Kab. Sumbawa	112.340.000	
		- Kab. Lombok Barat	112.340.000	
		- Kab. Lombok Timur	112.340.000	
24.	PR	OVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	4.712.340.000	
	a.	PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
		Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		
		 a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 		
		- Kab. Kupang	1.000.000.000	
		Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		

NO		DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1		2	3	4
		 a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana 		
		- Kab. Sumba Barat Daya	1.500.000.000	
	b.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
		Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		
		a) Sarana Prasarana Pasar Desa		
		- Kab. Kupang	212.340.000	
	C.	BINA PEMBANGUNAN DAERAH		DITJEN BINA BANGDA
		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Bina Bangda		
		 a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah 		
		- Kab. Manggarai	2.000.000.000	
25.	PR	OVINSI MALUKU	2.000.000.000	
	a.	PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
		 Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan 		
		 a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar 		
		_ Kab. Maluku Tenggara Barat	2.000.000.000	
26.	PR	OVINSI MALUKU UTARA	1.000.000.000	
	a.	PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
		Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
		 a) Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana 		
		_ Kota Ternate	1.000.000.000	
27.	PR	OVINSI PAPUA	13.362.500.000	
	a.	PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
		Pengembangan dan Penataan Wilayah Adm. Dan Perbatasan		
		a) Pembangunan Sarana Prasarana di Perbatasan antar Negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar		

NO	D	AERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI (Rp.)	KOMPONEN PEMBINA
1		2	3	4
		- Prov. Papua	2.000.000.000	
		- Kab. Keerom	2.500.000.000	
		- Kab. Pegunungan Bintang	2.500.000.000	
		- Kab. Merauke	2.000.000.000	
		- Kab. Boven digoel	1.000.000.000	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA		DITJEN PMD
	1) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG		
		 Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya 		
		- Kab. Jayapura	1.681.250.000	
		- Kab. Yapenwaropen	1.681.250.000	
28.	PRO	/INSI PAPUA BARAT	5.362.500.000	
		PENGUATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN UMUM		DITJEN PUM
) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana		
		 Fasilitasi Pembangunan Sarpras Pemerintahan dalam rangka Penanganan Bencana 		
		- Prov. Papua Barat	2.000.000.000	
			2.000.000.000	
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	2.000.000.000	DITJEN PMD
	ı	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	2.000.000.000	DITJEN PMD
	ı	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	2.000.000.000	DITJEN PMD
	ı	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 1) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat	1.681.250.000	DITJEN PMD
	ı	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA I) Fasilitasi Pengelolaan SDA dan TTG a) Fasilitasi Pelaksanaan PNPM-LMP dan Komponen Bantuan Langsung Masyarakat dalam Belanja Lembaga Sosial Lainnya		DITJEN PMD

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDOENSIA,

GAMAWAN FAUZI